**Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar yang dilakukan oleh Pos Polisi kepada Pengendara Angkutan Barang di Wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
Oleh : Muhammad Padri
Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum
Pembimbing II: Widia Edorita, SH., M.H
Alamat: Jl. Kakak Tua, Sim Pelajar, Tuanku Tambusai, Pekanbaru
Email: mfadri1310@gmail.com**

ABSTRACT

Wild charges against law enforcement carried out by the police to transport riders relic items Kepenghuluan Bangko Bangko, sub episode of filial piety, Rokan Hilir. charges made by the police station diKepenghuluan Bangko Bakti done with work shift system activity is certainly contrary to law No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption in article 12 the letter e that reads, are convicted with imprisonment for life or imprisonment of most short four (4) years old and most 20 (twenty) years and criminal fines of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and at most Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) . Tujuan penelitian these are: a. to know wild charges against law enforcement carried out by the Police to transport goods b. riders to know the constraints in the wild charges against law enforcement by the Police to transport the goods c. Rider To attempt countermeasures so that goods transport riders do not become victims of the wild collection.

The type of research or the approach used by the author is the juridical sociological legal research. This research was conducted in the area of Kepenghuluan Bangko Bangko, sub episode of filial piety, Rokan Hilir. As for the reason the author sets the location became the site of the author's research because of indications of wild charges committed by police against rider transport of goods in the region. In this study researchers use data sources that you can break down as follows: primary Data, i.e. data obtained directly provide research. Secondary data, i.e. data obtained indirectly through the research libraries (library research).

The issue of the proper functioning of the law in principle hold at least four factors, namely: the ruling factor, factor officers who enforce, support facilities, and the citizens of the community. As for the barriers in law enforcement is the mental attitude of the person's own officers, the lack of legal consciousness of the person doing the pungli and feel good will his deeds led to constraints in enforcing law, victims do not want to report the actions of the members of the police who did the wild charges. And as for the efforts of the response is: Identify areas that could potentially occur wild charges and take effective measures to eradicate wild charges, forcefully crack down on the country's civil apparatus involved wild charges, conduct more in-depth investigation to trawl the involvement of other persons-persons

Keywords: wild charges against law enforcement in Kepenghuluan Bangko Bakti

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional. Mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa. Serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.²

hambatan atas lalu lintas barang di Indonesia pada era otonomi daerah terjadi dalam bentuk hambatan berupa izin dan hambatan yang berupa pungutan³

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar termasuk dalam kategorikejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu sesuai dengan peraturan perundang undangan khususnya pada pada Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana masih banyak terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian yang melakukan tindakan pungutan liar dimasyarakat. Khususnya di wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

Hal ini tentu melanggar ketentuan didalam Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). E. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar yang dilakukan oleh Pos Polisi kepada Pengendara Angkutan Barang di Wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Pos Polisi kepada pengendara angkutan barang di wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh

¹AbdulKadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.7

²Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.2.

³Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Tata Kelola Ekonomi Daerah Di Indonesia*, 2007, hlm.8.

⁴Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, 2016, hlm.2.

Pos Polisi kepada Pengendara angkutan barang di wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir?

3. Bagaiamanakah upaya penanggulangan agar pengendara angkutan barang tidak menjadi korban pungutan liar di wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Pos Polisi kepada pengendara angkutan barang diKepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh Pos Polisi kepada pengendara angkutan barang di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan agar pengendara angkutan barang tidak menjadi korban pungutan liar di wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran untuk menemukan pikiran pikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Selain itu memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan pungutan yang dilakukan oleh pos polisi terhadap pengendara angkutan barang .
- c. Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian lanjutan

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.⁵

Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan gerakan ketertiban hukum (*rechtsorde*), yaitu yang melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁶

Menurut Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari pendapat simons tentang tindak pidana maka muncul pandangan Jonkers dan Utrecht yang merumuskan tindak pidana, yaitu meliputi:⁷

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh rang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan catatan dari dokumen perserikatan bangsa-bangsa tentang upaya pemberantasan korupsi, pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan Nasional atau inividu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial Internasional.

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahadjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

⁵Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm 100.

⁶Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 235.

⁷Jur Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 120.

tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁸

Dalam bidang hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan antara Negara-Negara yang berdaulat. Keadilan yang harus dicapai dan menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (sikap tidak memihak) yang pada akhirnya melahirkan ide *equality* (persamaan) yaitu persamaan dalam perlakuan artinya setiap orang dalam hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁰

a. Faktor hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegakan hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum

adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan menurut soerjono soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang prikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

hukum senantiasa dipengaruhi oleh hal-hal berikut:¹¹

⁸Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

⁹Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Nomor .1 Agustus 2010, hlm. 94-95.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42.

¹¹ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan faktor penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*,

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana nya;
2. Profesionalisme aparat penegak hukum;
3. Budaya hukum masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹²
2. Pungutan liar adalah pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan Nasional atau inividu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi komersial Internasional.¹³
3. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota kepolisisan Negara Republik Indonesia adalah pegawai negri pada kepolisisan negara republik indonesia.
5. Peraturan kepolisisan adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisisan negara republik indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan

oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Kenapa sifat deskriptif analitis yang digunakan karna menggambarkan permasalahan hukum dalam pungutan yang dilakukan oleh pos polisi terhadap pengendara angkutan barang di kepenghuluan bangko bakti, kecamatan bangko pusako, kabupaten rokan hilir.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya indikasi pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi terhadap pengendara angkutan barang di wilayah tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁴ Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Pos Polisi di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.
2. Anggota polisi sektor (polsek) Kecamatan Bangko Pusako.
3. Anggota Bantuan Polisi (Banpol) di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.
4. Korban pungutan liar di Kepenghuluan Bangko Bakti.

b. Sampel

Sehubungan populasi dalam penelitian ini relatif sedikit yaitu terdiri dari Kepala pos polisi, Anggota Banpol, Anggota Polsek Kecamatan Bangko Pusako, dan korban pungutan liar. Maka tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara Purposive, Yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010, hlm.28.

¹²Titik Triwulan Tutik, *loc.cit.*

¹³Soedjono Dirjosiswono, *loc.cit.*

---

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta. Jakarta: 2006, hlm. 130.

**Tabel I.1
Populasi Dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	(%)
1.	Kapos lantas Kepenghuluan Bangko Bakti	1	1	100
2.	Anggota banpol Kepenghuluan Bangko Bakti	4	1	100
3.	Anggota polsek Kecamatan Bangko Pusako	25	4	100
4.	Korban pungutan liar	30	10	50
Jumlah		60	16	-

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2016

4. Sumber Data

a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian yaitu di pos polisi kepenghuluan bangko bakti, kecamatan bangko pusako, kabupaten rokan hilir yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber, yaitu kepala pos polisi Kepenghuluan Bangko Bakti, anggota Bantuan Polisi, Anggota Polisi Sektor Kecamatan Bangko Pusako.

b. Data Skunder

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mealui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang no 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan tehnik pengumpulan dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan langsung di Pos Polisi Kepenghuluan Bangko Bakti,

Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan ini telah disediakan jawaban-jawabannya.
3. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden yaitu wawancara dengan Kepala Pos Lantas Kepenghuluan Bangko Bakti, Anggota Banpol, Anggota polsek Kecamatan Bangko Pusako, dan korban pungutan liar.
4. Kajian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mencari data skunder guna mendukung data primer terhadap kajian lingkungan hidup strategis.

6. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara kuantitatif yaitu data yang menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kepenghuluan Bangko Bakti.

1. Sejarah Kepenghuluan Bangko Bakti

Kepenghuluan Bangko Bakti terbentuk mulai tahun 1995 merupakan Kepenghuluan pemekaran dari Kepenghuluan Bangko Jaya yang merupakan pemekaran dari Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 1995, (tepatnya) pada tanggal 15 November 1995 dimekarkan menjadi Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Rimba Melintang. Selanjutnya Kecamatan sekarang sekarang begitupun

keberadaan kepemimpinan yang berubah sesuai dengan peraturan yang ada, dimana 35% luas Wilayahnya merupakan area Operasi PT. CPI dan rekanannya yang bergerak dibidang Migas.

2. Letak geografis Kepenghuluan Bangko Bakti

Kepenghuluan Bangko Bakti termasuk Wilayah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan luas Wilayah 465.000 Ha. Dataran dengan ketinggian rata-rata 18-31 m diatas permukaan laut. Secara administratif wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti di batasi oleh:

Tabel. I.2.
Batas wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti

Batas	Desa/Kepenghuluan	Kecamatan
Sebelah Utara	Teluk Nilap	Kubu
Sebelah Selatan	Bangko Pusako	Bangko Pusako
Sebelah Timur	Bangko Jaya	Bangko Pusako
Sebelah Barat	Bangko Sempurna	Bangko Pusako

Sumber : RPJM Kepenghuluan Bnagko Bakti 2015-2021

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kepenghuluan Bangko Bakti adalah sebagai berikut:

Tabel. I.3.
Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	2.382 orang
Jumlah perempuan	2.227 orang
Jumlah total	4.609 orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.097 KK

Sumber : RPJM Kepenghuluan Bangko Bakti

4. Visi dan Misi Kepenghuluan Bangko Bakti

a. Visi Kepenghuluan

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang

diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Kepenghuluan. Penyusunan visi diKepenghuluan Bangko Bakti dilkauan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan diKepenghuluan, seperti pemerintah Kepenghuluan, BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Kepenghuluan dan masyarakat Kepenghuluan pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka visi Kepenghuluan Bangko Bakti ialah: "Mewujudkan Kepenghuluan yang bersih, disiplin, makmur, sejahtera, dan agamis melalui tata kelola pemerintahan yang jujur dan adil"

b. Misi Kepenghuluan

Sebagaimana penyusunan visi, pendekatan yang dilakukan dalam menyusun misi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Kepenghuluan. Misi memuat pernyataan-pernyataan yang harus dilakukan kepenghuluan agar visi Kepenghuluan tersebut dapat tercapai.

Adapun misi kepenghuluan Bangko Bakti ialah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan Kepenghuluan secara benar, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Melaksanakan pembangunan Kepenghuluan berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan berwawasan lingkungan serta kemandirian
- 3) Meningkatkan peran organisasi keagamaan dalam pemberdayaan umat
- 4) Berupaya membina dan mengembangkan seluruh aspek potensial yang dimiliki Kepenghuluan Bangko Bakti, sehingga bisa terwujud masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

5. Kebijakan Pembangunan

Prioritas kebijakan program pembangunan Kepenghuluan Bangko Bakti sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam

rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015-2021 nantinya benar-benar berjalan efektif dan menanggulangi permasalahan dimasyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kepenghuluan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level Kepenghuluan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kepenghuluan Bangko Bakti serta program prioritas tahun 2015-2021, maka arah kebijakan anggaran pembangunan diKepenghuluan Bangko Bakti ialah sebagai berikut:

- 1) Efisiensi anggaran pada belanja tidak langsung
- 2) Memperbesar alokasi belanja langsung dan bantuan sosial dalam mempercepat pengurangan kemiskinan
- 3) Mencari peluang pendanaan dari berbagai sumber, baik dari bantuan pos pemerintah maupun dari bantuan langsung masyarakat yang digulirkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi kepada pengendara angkutan barang di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabutapen Rokan Hilir

1. Faktor penegakan hukum

Masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit empat faktor, yaitu:¹⁵

a. Faktor hukumnya

Faktor hukumnya yang dimaksudkan disini adalah merupakan faktor yuridis bagaimana agar suatu hukum bisa ditegakkan atau diberlakukan pada masyarakat. Hukum atau undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan

materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaruan. Artinya supaya undang undang itu bisa ditegakkan atau diberlakukan dimasyarakat (atau dengan kata lain hukum tidak merupakan huruf yang mati) maka diperlukan syarat-syarat tertentu, yakni:

- 1) Keterbukaan didalam proses pembuatan
- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan tertentu, melalui cara-cara:
  - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu;
  - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun;
  - c) Acara dengar pendapat diDewan Perwakilan Rakyat;
  - d) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat atau para ahli

Dengan demikian, maka itu berarti bahwa bagaimana cara pembuatan suatu peraturan perundnag-undangan (hukum), apakah telah memenuhi syarat yang ditentukan, itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

b. Faktor petugas yang menegakkan

Petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam penegakkan suatu hukum (bisa undang-undang atau peraturan tertulis lainnya). Petugas yang

¹⁵ Zaeni Asyadi dan Arief Rahman, *Op.cit*, hlm 183

menegakkan hukum itu salah satunya ialah kepolisisan.

Kepolisisan Negara Republik Indonesia berada dibawah presiden, yang dipimpin Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga dalam alenia ke-6 dari penjelasan umum undang-undang nomor 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa kepolisisan bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

c. Fasilitas yang mendukung

Tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu maka penegakkan hukum tidak akan mungkin bisa berjalan dengan lancar

d. Warga masyarakat

Warga masyarakat dimaksudkan disini adalah warga dimana hukum tersebut akan diberlakukan, sebab ada saja suatu hukum hanya diberlakukan dalam suatu wilayah tertentu atau dalam suatu masyarakat tertentu.

Soejono Soekonto menyatakan bahwa dari sudut sistem sosial budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plurary society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Disamping itu, sebagian besar masyarakat indonesia bertempat tinggal dipedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan masyarakat perkotaan.

Tingkat pendidikan, pandangan dan pemahaman sosial, ekonomi dan budaya masyarakat perkotaan, dan oleh

karena itu faktor warga masyarakat juga akan mempengaruhi penegakan hukum karena secara umum warga masyarakat juga akan memengaruhi penegakan hukum karena secara umum warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya;
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik didalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Pungutan liar yang terjadi di wilayah Kepenghulun Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir tentu mencoreng citra polisi itu sendiri. Bagaimana tidak, kepolisian yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat sekaligus sebagai mitra masyarakat malah memberikan contoh yang tidak baik hal ini tentu tidak boleh dibiarkan terjadi terus menerus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota polsek Bangko Pusako beliau mengatakan bahwasannya beliau mengetahui adanya pungutan yang dilakukan oleh pos polisi tersebut dan beliau juga mengetahui pungutan tersebut melanggar undang-undang.¹⁶

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwasannya dari kepolisian itu sendiri terjadi pembiaran terhadap anggotanya yang melakukan pungutan liar ditambah lagi masyarakat yang

---

¹⁶ Wawancara dengan Aiptu *Sutiono*, Anggota polsek, Bertempat di Polsek Bangko Pusako

kurang memahami akan hukum sehingga mengakibatkan tindakan pungutan liar ini menjadi merajalela.

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar di institusi polri dinilai masih tajam kebawah dan tumpul keatas. Petinggi polri diingatkan untuk melakukan pembersihan secara tuntas, menyeret para pelaku pungli sampai ke pengadilan. Direktur eksekutif lembaga kajian strategis kepolisian Indonesia Edi Hasibuan mengingatkan setiap anggota polri yang terlibat pungli seharusnya diproses hingga keperadilan umum.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syafrizal anggota Banpol, beliau mengatakan hasil pungutan terhadap pengendara angkutan barang di wilayah Kepenghuluan Bangko Bakti ialah untuk biaya operasional pos polisi tersebut.¹⁸

Alasan biaya operasional pos tentu hanya sebagai alasan belaka, karna kita mengetahui bahwasannya kepolisian tentu memiliki biaya operasional sendiri. Karna tindakan pungli inilah buruknya citra polisi dimata masyarakat.

Tindakan pos polisi tersebut merupakan tindak pidana yang dimana perbuatan pungli tersebut diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terdapat didalam Pasal 12 huruf e yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

¹⁷ <http://www.mediaindonesia.com/news/read/72392/polisi-terlibat-pungli-harus-dipidana/2016-10-16> diakses, tanggal 06 April 2017

¹⁸ Wawancara dengan Syafrizal Anggota Banpol, Bertempat di Pos polisi Bangko Bakti.

B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi kepada pengendara angkutan barang di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir

1. Kendala dalam penegakan hukum

Dalam perkembangannya, tujuan hukum didalam masyarakat mengalami kemajuan, yaitu:¹⁹

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib masyarakat, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, hukum mempunyai ciri memerintah, melarang, dan memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa saja yang bersalah dan siapa yang benar.
- c. Sebagai penggerak pembangunan, daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai fungsi kritis hukum, Soedjono Dirdjosisworo mengatakan: “dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk didalamnya.”

¹⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 19

Agar hukum berjalan dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melakukan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas misalkan:²⁰

- 1) Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan *a contrario*
- 2) Disamping hal-hal tersebut diatas dibutuhkan kecakapan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Pelanggaran hukum secara substansial dapat dibagi dua. Yang pertama adalah *conventional crimes* antara lain burglary atau larceny yang biasanya pelakunya dapat dipidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Yang kedua adalah *white-collar crime* yang pada umumnya tidak dapat dikenakan KUHP. Seorang perampok umumnya dihukum penjara, didenda atau dikenakan *probation*. Seorang dokter dapat di cabut izin prakteknya.²¹

Pelanggaran hukum senantiasa pelakunya tidak hanya selalu masyarakat awam yang selalu melakukan pelanggaran hukum namun penegak hukum itu sendiri dewasa ini cenderung banyak yang melakukan pelanggaran hukum seolah-olah memanfaatkan jabatan penegak hukumnya untuk memainkan hukum demi keuntungan pribadi nya sendiri maupun untuk kepentingan kelompok. seperti halnya pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi terhadap pengendara angkutan barang diwilayah kepenghuluan Bangko Bakti. Namun karna pelaku pelanggaran hukum tersebut aparat penegak hukum sendiri sehingga bagi masyarakat awam yang menjadi korban pungutan enggan untuk melaporkan tindakan pungutan liar tersebut ke pihak yang berwajib.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang anggota polisi sektor Kecamatan Bangko Pusako beliau mengatakan, "bahwasannya tidak adanya laporan dari masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi

tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi tersebut sehingga tidak dapat diproses".²² Hal ini tentu memerlukan mengingat letak pos polisi tersebut tepat ditepi jalan lintas Riau-Sumut yang merupakan jalan akses satu-satunya yang dijadikan masyarakat penduduk Bangko-Bakti dan juga Penduduk Indonesia yang seharusnya menjadi jalan bebas dari pungutan liar sehingga masyarakat dapat menjalankan roda perekonomian dengan nyaman-nyamannya.

Berikut merupakan beberapa kendala penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi terhadap pengendara angkutan barang diwilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir:

- a.) Sikap mental oknum petugas itu sendiri, tidak adanya kesadaran hukum oknum yang melakukan pungli tersebut dan merasa nyaman akan perbuatannya menyebabkan kendala dalam penegakan hukum
- b) Korban yang tidak mau melaporkan tindakan oknum polisi yang melakukan pungutan liar tersebut.

C. Upaya penanggulangan agar pengendara angkutan barang tidak menjadi korban pungutan liar di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir

1. Upaya penanggulangan pungutan liar

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan dan sangat merugikan masyarakat, khususnya pengendara angkutan barang diwilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir. sehingga dibutuhkan upaya dalam penanggulannya, dan untuk meminimalisir agar pengemudi angkutan barang tidak menjadi korban pungutan liar maka sanksi yang tegas haruslah dikenakan kepada para oknum polisi yang tidak bertanggung jawab tersebut, salah satu sanksinya ialah sanksi pidana kepada tersangka yang melakukan tindakan pungli.

kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi (PANRB)

²⁰ *ibid*, hlm. 20

²¹ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, 2000, hlm. 86-87

²² Wawancara dengan Bapak Aipda M. Sihombing, Anggota Polsek Bangko Pusako, pada hari Senin 20 April 2016, Bertempat di Kantor Polsek Bangko Pusako

mengeluarkan surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut instruksi presiden Joko Widodo terkait pemberantasan pungutan liar (pungli) surat edaran kementerian pendayagunaan aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2016, Surat edaran tersebut berlaku diseluruh lingkungan instansi pemerintah. Dalam surat edaran tersebut menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para pemimpin instansi pemerintah tersebut yaitu:²³

- a. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungutan liar dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungutan liar;
- b. Menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungutan liar;
- c. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain;
- d. Meminta para kepala instansi untuk memberlakukan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dan masyarakat;
- e. Memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan
- f. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungutan liar;
- g. Meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas aparatur sipil Negara
- h. Membuka akses yang mudah dan murah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.

Dan bagi korban yang terkena pungutan liar haruslah lebih dipahami lagi mengenai hukum sehingga bagi pengendara angkutan barang maupun masyarakat tidak mudah tertipu oleh tindakan-tindakan aparatur penegak hukum yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya hanya untuk keuntungan pribadi maupun kelompok.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi terhadap pengendara angkutan barang diwilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir jelas merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan seharusnya dapat dipidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun masyarakat ataupun pengendara angkutan barang khususnya yang berada diKepenghuluan Bangko Bakti tidak bisa berbuat banyak dan cenderung tidak berani untuk melaporkan tindakan pungutan liar pos polisi tersebut sehingga menyebabkan tindakan pungutan liar tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut. Oleh karenanya haruslah lebih ditingkatkan lagi pengawasan, pembinaan anggota, dan kesadaran hukum anggota kepolisian. Sehingga tidak tergiur untuk melakukan pungli dan masyarakat tidak dirugikan
2. Kendala dalam penegakan hukum yang terjadi diKepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir yaitu sikap mental oknum polisi itu sendiri yang tidak adanya kesadaran hukum dan cenderung merasa nyaman akan tindakan pungutan liar yang dilakukan, dan tidak adanya laporan dari korban ataupun pengendara yang terkena pungutan liar yang dikarenakan kurangnya pemahaman para korban pungli mengenai hukum. Sehingga hal ini menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh pos polisi kepada pengendara angkutan barang diWilayah Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir
3. Upaya penanggulangan agar pengemudi angkutan barang tidak menjadi korban pungutan liar yakni, mengidentifikasi area yang berpotensi terjadi pungutan liar dan mengambil langkah-langkah efektif untuk memberantas pungutan liar, menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat pungutan liar, melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjaring keterlibatan oknum-oknum lain, meminta para kepala instansi untuk memberlakukan

---

²³ <http://www.liputan6.com/read/2629058/8-cara-kementerian-panrb-berantas-pungli> di akses, 5 April 2017

pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi hubungan langsung antara petugas dan masyarakat, memberikan akses yang luas pada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah praktik pungutan liar, meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan kualitas aparatur sipil Negara.

B. SARAN

1. Kepolisian perlu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pungutan liar dengan menambah intensitas pengawasan terhadap pos polisi khususnya di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir dan juga melakukan penyuluhan hukum didalam masyarakat
2. Masyarakat khususnya pengendara angkutan barang diKepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir harus menyadari pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum demi terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hokum
3. Berdasarkan atas asas *equality before the law* (persamaan didepan hukum) oknum kepolisian yang melakukan tindakan pungutan liar liar harus diberikan sanksi pidana dan dibawa kepengadilan apabila terbukti melakukan pungli, tidak hanya sanksi administrasi maupun

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Hamzah, Jur Andi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Tata Kelola Ekonomi Daerah Di Indonesia*, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perwakilan Badan pengawasan Keuangan Pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, 2016.

Salim, Abbas, 2006, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo. Jakarta.

Soerkanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi kelima*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sujata, Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, 2000

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006.

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

Erdiansyah, "Kekerasan Dalam Penyediaan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 Nomor .1 Agustus 2010.

Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan faktor penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I No. 1 Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tambahan lembaran negara nomor 5025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan

D. Website

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/72392/polisi-terlibat-pungli-harus-dipidana/2016-10-16> diakses, tanggal 06 April 2017